

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 mengenai standar isi secara normatif menjelaskan bahwa mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang berfokus pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak serta kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter seperti yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Teori Margaret Stimman Branson (Branson, 1999:8) menjelaskan bahwa terdapat tiga kompetensi kewarganegaraan utama Pendidikan Kewarganegaraan yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*). *Civic knowledge* berkaitan dengan isi atau apa yang harus warga negara ketahui. *Civic skills* merupakan keterampilan apa yang seharusnya dimiliki oleh warga negara yang mencakup; keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi. Sedangkan *civic disposition* berkaitan dengan karakter privat dan publik dari warga negara yang perlu dipelihara dan tingkatan dalam demokrasi konstitusional.

Dalam mentransfer ilmu, mengasah keterampilan, dan membentuk karakter peserta didik melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut dibutuhkan sosok guru yang dapat mencerminkan sikap yang berdasar pada nilai-nilai demokrasi kepada siswa. Guru adalah sosok teladan bagi setiap peserta didiknya, karena selain menjadi seorang pendidik di sekolah guru PPKn khususnya juga akan menjadi orang yang bertanggung jawab dalam pembinaan sikap demokratis siswa. Seorang guru harus memiliki sikap dan perilaku yang bersahabat, hangat, komunikatif, demokratis, dan sopan santun

terhadap siswanya. Seorang guru PPKn harus tetap memelihara wibawa sebagai guru dengan menjadi guru PPKn yang cerdas, kreatif, dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran PPKn. Dengan demikian tujuan dari seorang guru PPKn adalah untuk mencerdaskan peserta didiknya dan menjadikannya sebagai warga negara yang cerdas serta paham akan hak dan kewajibannya. Hal ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menumbuhkan serta mengembangkan sikap demokratis dalam diri setiap peserta didiknya.

Dalam (Pinem, W., Jamaludin, Iqbal, M., & Lincah, M, 2021:88) juga dijelaskan bahwa seorang siswa dapat dikatakan memiliki karakter perduli, diantaranya siswa dapat menjaga kebersihan, keindahan, dan kelestarian alam; siswa dapat berbagi dan berpartisipasi dalam membantu sesuai dengan kemampuannya kepada orang lain yang terkena musibah atau kurang beruntung dalam hidupnya; siswa tidak pasif (tidak acuh) tetapi proaktif dengan perubahan kondisi lingkungan.

Sikap demokratis adalah sikap saling menghargai diantara sesama dalam kehidupan bermasyarakat, dalam hal ini peserta didik diberikan kesempatan untuk dapat memberikan tanggapan, pendapat dan juga penilaian terhadap nilai-nilai yang ditemukannya di kelas. Tujuan dari adanya sikap demokratis ini dapat digunakan untuk menginternalisasikan nilai-nilai seperti nilai keterbukaan, kejujuran, penghargaan terhadap pendapat orang lain, rendah hati, dan juga sikap toleransi antar sesama temannya mulai dari hal-hal sederhana yang tercipta di dalam kelas. Melalui proses pendidikan demokratis tersebut maka peserta didik diajak untuk mulai bisa berani dalam mengungkapkan gagasan, pendapat maupun perasaannya.

Peserta didik adalah salah satu generasi muda yang intelektualnya perlu dibina secara holistik dan dilatih agar dapat mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat dengan pemikiran yang positif, kritis, bertanggung jawab, dan dewasa. Dalam proses pembelajaran tersebut, kelas menjadi tempat pertama di sekolah untuk memaknai nilai-nilai yang dipelajari dalam pembelajaran PPKn, dimana kelas diupayakan untuk menjadi tempat nyaman bagi setiap siswa dalam menumbuhkan sikap demokratis. Untuk menjadikan kelas sebagai tempat yang nyaman tentunya harus ada interaksi yang baik antara guru mata pelajaran PPKn dengan siswa pada proses belajar mengajar di kelas. Membentuk siswa yang memiliki sikap demokratis, guru mata pelajaran PPKn harus dapat menjadikan kelas sebagai laboratorium demokrasi.

Seperti yang disampaikan oleh D. Sundawa (2015) bahwa definisi kelas dijadikan sebagai laboratorium demokrasi adalah ruang kelas difungsikan sebagai miniatur masyarakat dalam artian sebagai tempat pembelajaran melalui metode praktikum sehingga nantinya mampu menghasilkan pengalaman belajar, dimana siswa dapat berinteraksi dengan siswa lain, pendidik, bahan ajar, dan lingkungan untuk dapat mendiskusikan serta memecahkan masalah yang telah diamati secara langsung terkait dengan beberapa masalah yang ada sehingga nantinya siswa dapat mengimplementasikan apa yang telah mereka pelajari kepada masyarakat dalam interaksinya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelas sebagai laboratorium demokrasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan nilai-nilai yang dipelajari dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila

dan Kewarganegaraan, dimana sebagai pembelajaran yang demokratis diharapkan dapat merubah perilaku peserta didik.

Nilai-nilai demokrasi dinilai berhasil apabila siswa menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi misalnya toleransi, berani mengemukakan pendapat, dan menghargai perbedaan pendapat siswa lain terutama di dalam kelas. nilai demokrasi akan muncul dan berkembang pada diri siswa apabila memiliki sikap positif terhadap nilai demokrasi dan terbiasa melakukannya. (Rini, 2017:165)

Dalam pandangan Moerdiono (Sumarto, 2018:61-62) menjelaskan adanya 3 tataran nilai dalam Pendidikan Demokrasi. Pertama nilai dasar, yaitu suatu nilai prinsip yang bersifat umum, abstrak dan tetap, dan yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu dan tempat. Nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Kedua nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program dan proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Dan ketiga nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, badan-badan ekonomi, pimpinan kemasyarakatan, bahkan warganegara secara perseorangan.

Pembelajaran PPKn sebagai pembelajaran yang demokratis menuntut dan melatih siswa untuk mengembangkan kemampuan sosial dan kemandiriannya sebagai warga negara yang mampu menghargai dan menghormati perbedaan yang beragam di sekitar peserta didik tersebut, selain itu peserta didik tersebut juga akan mampu bekerja sama dengan baik dengan teman sebaya dan guru, bahkan

terhadap seluruh anggota sekolah lain, dan khususnya peserta didik nanti akan memiliki komitmen untuk mencapai tujuan bersama dengan berkreasi secara bebas dalam menyampaikan pendapat dan solusi.

Akan tetapi, fenomena yang saat ini terjadi dikalangan siswa di sekolah menunjukkan bahwa siswa belum mampu memperlihatkan sikap demokratis yang baik, bahkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dianggap sebagai pelajaran yang membosankan dan masih banyak siswa yang menganggap bahwa acuan penilaian dari mata pelajaran PPKn adalah berdasarkan tingkat kemampuan siswa untuk menghafal materi yang disampaikan oleh gurunya, mata pelajaran PPKn saat ini menjadi membosankan untuk siswa karena materi yang disampaikan selalu sama dalam kurun waktu yang berulang-ulang setiap pembelajaran. Di sisi lain sebenarnya tujuan mata pelajaran PPKn yang seharusnya bukanlah hafalan namun lebih kepada cerminan dan implementasi melalui sikap di dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di SMA Negeri 14 Medan pada hari Senin, 24 Januari 2022 dalam kegiatan pembelajaran di kelas X IPS 3 ketika pelajaran PPKn berlangsung siswa terlihat pasif ketika mengikuti pembelajaran. Ketika proses belajar mengajar berlangsung, dari total 35 siswa hanya ada 6 siswa yang bertanya ketika guru mata pelajaran PPKn selesai menjelaskan materi dan mempersilahkan mereka untuk mengajukan pertanyaan atas materi yang kurang dipahami. Minimnya siswa yang mau memberikan pertanyaan, maka guru mata pelajaran PPKn berinisiatif untuk melempar beberapa

pertanyaan kepada mereka dan hasilnya hanya ada 4 siswa yang mau menjawab pertanyaan tersebut.

Kemudian peneliti melakukan observasi kedua yakni pada hari Rabu, 26 Januari 2022 pada saat pembelajaran PPKn berlangsung di kelas X MIPA 3 peneliti mengamati bahwa hanya ada 8 siswa yang berani mengutarakan pendapat mengenai permasalahan yang terjadi di dalam kelas dan hanya ada 2 siswa yang mau memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Dan pada hasil observasi ketiga yakni pada hari Sabtu, 29 Januari 2022 yang berlangsung di kelas XI IPS 2 pada saat mata pelajaran PPKn berlangsung peneliti mengamati bahwa ada sejumlah 7 orang siswa yang memberikan argumen pada saat guru mata pelajaran mengadakan sesi presentasi di dalam kelas dan hanya 2 orang siswa yang menjawab pertanyaan tersebut dari total siswa yang melakukan presentasi sejumlah 6 orang siswa.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana strategi guru PPKn di SMA Negeri 14 Medan dalam mengimplementasikan kelas sebagai laboratorium demokrasi dengan judul **“Strategi Guru PPKn Dalam Mengimplementasikan Kelas Sebagai Laboratorium Demokrasi (Studi Deskriptif Di SMA Negeri 14 Medan)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, adapun identifikasi masalah yang dirangkum peneliti adalah sebagai berikut:

1. Selama melaksanakan pembelajaran di kelas, siswa terlihat pasif dalam mengutarakan pendapat. Contohnya adalah siswa tidak bertanya mengenai materi yang telah dijelaskan dan tidak mau memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh guru.
2. Siswa jarang terlibat dalam mengajukan diri sebagai perangkat kelas dan masih banyak siswa yang tidak ikut serta dalam memilih teman yang mencalonkan sebagai perangkat kelas.
3. Siswa terlihat pasif dalam mengutarakan pendapat dan mengajukan solusi atas diskusi permasalahan yang terjadi di kelas.
4. Ketidakaktifan siswa dapat disebabkan oleh rendahnya minat siswa dalam mengikuti pembelajaran.
5. Ketidakaktifan siswa dapat disebabkan oleh media pembelajaran yang disediakan oleh guru kurang menarik atau metode mengajar yang dipraktekkan oleh guru selama pembelajaran di dalam kelas yang kurang memotivasi siswa.
6. Strategi belajar mengajar yang digunakan oleh guru adalah ekspositorik, yaitu pengajaran yang menyampaikan pesan dalam keadaan “telah siap” dalam arti telah diolah secara tuntas oleh guru sebelum disampaikan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah tersebut, dalam hal ini penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu mengenai strategi guru PPKn dalam mengimplementasikan kelas sebagai laboratorium demokrasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, adapun rumusan masalah yang penulis ambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru PPKn dalam mengimplementasikan kelas sebagai laboratorium demokrasi di SMA Negeri 14 Medan?
2. Apa saja hambatan yang dialami oleh guru PPKn dalam mengimplementasikan kelas sebagai laboratorium demokrasi di SMA Negeri 14 Medan?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh guru PPKn dalam mengimplementasikan kelas sebagai laboratorium demokrasi di SMA Negeri 14 Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru PPKn dalam mengimplementasikan kelas sebagai laboratorium demokrasi di SMA Negeri 14 Medan.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh guru PPKn dalam mengimplementasikan kelas sebagai laboratorium demokrasi di SMA Negeri 14 Medan.
3. Untuk mendeskripsikan upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh guru PPKn dalam mengimplementasikan kelas sebagai laboratorium demokrasi di SMA Negeri 14 Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa gambaran terhadap kajian keilmuan dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya dalam kajian pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru PPKn dalam mengimplementasikan kelas sebagai laboratorium demokrasi, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh guru PPKn dalam mengimplementasikan kelas sebagai laboratorium demokrasi, dan strategi yang dilakukan oleh guru PPKn dalam mengimplementasikan kelas sebagai laboratorium demokrasi di SMA Negeri 14 Medan.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun pembaca terkait kajian yang berkenaan dengan memberikan

gambaran umum kepada masyarakat mengenai pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru PPKn dalam mengimplementasikan kelas sebagai laboratorium demokrasi, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh guru PPKn dalam mengimplementasikan kelas sebagai laboratorium demokrasi, dan strategi yang dilakukan oleh guru PPKn dalam mengimplementasikan kelas sebagai laboratorium demokrasi di SMA Negeri 14 Medan.

b. Bagi Sekolah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan kepada sekolah dan khususnya kepada guru PPKn dalam pentingnya pengembangan strategi pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran di kelas agar terciptanya kelas sebagai laboratorium demokrasi dan siswa yang aktif dalam menanggapi materi pembelajaran maupun aktif terlibat dalam pemilihan perangkat kelas dan memberi solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di dalam kelas.

c. Bagi Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah referensi kepustakaan di Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sehingga dapat membantu dosen dan mahasiswa PPKn yang akan melakukan penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan penelitian selanjutnya mengenai strategi guru PPKn dalam mengimplementasikan kelas sebagai laboratorium demokrasi.



THE
Character Building
UNIVERSITY